

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi rakyat di setiap negara. Pada masa globalisasi ini dimana dibukanya era perdagangan bebas yang mengharuskan semua negara didunia harus bergerak aktif dalam perdagangan dunia dan berbenah diri memperbaiki perekonomian negaranya, agar tidak semakin tertinggal dari negara-negara lain, dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, serta kondisi perekonomian dunia yang semakin bebas dan terbuka. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka timbul inisiatif dari negara-negara di dunia yang mempunyai visi dan misi, serta pandangan yang sama dalam meningkatkan perekonomian negaranya yaitu dengan melakukan kerjasama ekonomi.

Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam satu kawasan menjadi sebuah forum himpunan bagi negara-negara yang mempunyai satu pandangan, visi dan misi, serta kesamaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, seperti contoh Trans-pasific partnership yang merupakan perjanjian

perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik. Trans-pasific partnership atau TPP merupakan kerjasama regional yang mempunyai misi Menstabiliskan tarif dagang antar negara anggota agar terwujud integritas dalam kerjasama ini. Perjanjian Trans-Pasific Partnership berawal dari inisiasi pembentukan Pacific Four (P4) yang di mulai dengan peandatangann P4 yang berupa MOU kerjasama buruh dan juga kerjasama di Wellington oleh 4 negara yaitu Selandia Baru, Chile, Singapura, dan Brunei Darussalam, penandatanganan P4 ini mulai berlaku sejak 28 Mei 2006. Kemudian di susul oleh Vietnam, Peru, dan Australia Pada tahun 2008 sedangkan Amerika Serikat baru menunjukkan ketertarikan pada tahun itu. Amerika Serikat resmi bergabung pada 14 Desember 2009. Pada tahun 2010, Malaysia bergabung dalam Pacific Four (P4) dan P4 diganti menjadi Trans Pacific Agreement (TPP) sebagai bentuk negosiasi baru. Pada tahun 2010 hingga 2011, Perjanjian TPP mempunyai 9 negara mitra yang keseluruhannya merupakan anggota APEC (Elms & Lim, 2012).

Trans-Pasific Partnership atau TPP mempunyai beberapa manfaat ekonomi yang positif bagi perekonomian Amerika Serikat, manfaat ini akan memberikan kemajuan jangka Panjang pada perekonomian AS, selain itu AS dapat memperkuat aliansi hubungan perdagangan yang semakin kuat dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik, terciptanya FTA yang dapat menguntungkan AS, dan juga memperkuat

Amerika sebagai pembuat aturan pada perdagangan bebas kawasan regional. Amerika Serikat mulai memberikan perhatiannya terhadap Asia Pasifik sejak memutuskan untuk terlibat dengan perjanjian TPP. Keputusan ini dilakukan karena Amerika memandang posisi Asia semakin vital bagi kepentingan dagang dan keamanannya. Hal ini juga semakin menguntungkan Amerika jika negara-negara di kawasan Asia pasifik bergabung dengan TPP sehingga Amerika terus berupaya untuk mendorong dan mengajak negara-negara di dunia untuk bergabung ke dalam TPP tersebut agar memperbanyak negara yang menjadi mitra kerjasama. Pada saat bergabung Amerika Serikat sebagai negara pertama (selain Negara pendiri) dari Negara lain yang bergabung ke blok perdagangan dalam kerangka TPP tersebut. Kebijakan yang diambil Amerika Serikat ini dapat dipahami karena pada saat itu Amerika Serikat berada dalam situasi krisis ekonomi. Oleh karena itu, untuk memfasilitasi perbaikan ekonominya dibutuhkan mitra ekonomi yang lebih luas untuk membantu perekonomian agar pulih kembali. Disamping itu, kebijakan Amerika Serikat setelah masuk ke TPP, begitu terlihat jelas dimana Amerika Serikat lebih gencar dan berperan aktif serta terus mendorong Negara-negara lain agar bergabung ke dalam TPP (Trans Pasific Partnership). (Mizohata, 2012) Keterlibatan ini menempatkan posisi yang relatif lebih strategis untuk Amerika Serikat dalam ikut serta mempromosikan dan kemudian mendorong

negara-negara di dunia untuk bergabung ke TPP tersebut. Bersamaan dengan hal tersebut Amerika Serikat menggunakan TPP ini menjadi acuan kebijakan politik "Asia Pivot" atau "Rebalancing toward Asia" seperti yang disampaikan oleh presiden Obama dalam beberapa pidatonya di Tokyo (McBride, Chatzky, & Siripurapu, 2021).



Gambar 1. Peta Negara Anggota TPP:

<https://www.coha.org/the-trans-pacific-partnership-free-trade-at-what-costs/>

TPP atau Kemitraan Tans pasifik mempunyai konsep perdagangan bebas pada sektor barang, jasa, maupun investasi sehingga Samudera pasifik dapat menjadi perputaran perdagangan yang besar. Menurut US Representative atau dewan perwakilan Amerika Kerjasam kawasan ini juga menghasilkan produk ekspor yaitu 775 miliar USD atau setara 61% lebih besar dari total ekspor Amerika di berbagai negara dunia. Hal ini membuat Amerika menjadikan TPP sebagai prioritas utama untuk

meningkatkan ekspor, menciptakan lapangan kerja, dan melindungi sector bisnisnya di luar negeri (Nuzulurridha, 2017).

Pada pemerintahan AS keterlibatan di TPP berawal pada masa pemerintahan Bush yang kemudian berganti kepemimpinan yang di pegang oleh Barrack Obama. Perpindahan kekuasaan ini juga menjadikan kebijakan perdagangan utama Amerika Serikat berubah . Adanya pengaturan ulang tolak ukur dalam strategi kebijakan perdagangan internasional dan perubahan fokus Amerika Serikat dari Barat ke Timur dipandang menjadi salah satu cara yang dapat menyelesaikan krisis finansial yang ada pada akhir 2007 (Cleverina & Munestri, S.S, MA, 2018). Oleh karena itu, pemerintah Obama kemudian mengeluarkan strategi rebalancing terhadap Asia-Pasifik dan mulai menetapkan keputusan untuk dapat bergabung dengan kerjasama regional di kawasan Asia-Pasifik. Pergeseran fokus politik luar negeri Obama ini menekankan bagaimana pentingnya potensi Asia-Pasifik untuk mencapai prioritas tertingginya yaitu untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk rakyat Amerika. Konsep tersebut disampaikan oleh Presiden Obama dalam pidatonya tentang rebalance towards Asia di dalam keterlibatan Amerika Serikat di Trans Pacific Partnership (TPP). Amerika Serikat menjadikan perjanjian TPP sebagai prioritas utama negaranya untuk meningkatkan ekspor, melindungi sektor bisnis diluar negeri, dan menciptakan lapangan

pekerjaan di Amerika Serikat. Kepemimpinan Obama pada periode kedua memposisikan globalisasi adalah arena penting bagi peningkatan kompleksitas interdependensi global. Dengan pivot to Asia atau Asia First merupakan penegasan oleh Obama bahwa AS terlalu terkonsentrasi pada aktifitas sebagai aktor pemberi keamanan dunia lewat agenda kontra-terorisme, namun melewatkan perkembangan ekonomi spektakuler yang terjadi di Asia, khususnya di Asia Timur (termasuk Asia Tenggara). AS menyepakati pembentukan kerjasama mega-regional yang bernama TPP (Trans Pacific Partnership). Skema kerjasama perdagangan yang tidak hanya melibatkan berbagai negara, tetapi sebagai langkah ambisius untuk menerapkan perdagangan multilateral yang lebih mengikat.

Tak lama setelah penandatanganan TPP Agreement, Amerika Serikat mengadakan pemilihan presiden baru pada akhir tahun 2016. Salah satu kandidat presiden kala itu adalah Donald J. Trump atau lebih familiar dikenal dengan Donald Trump. Sejak masa kampanye, Trump sudah mulai memperlihatkan arah dan rencana kebijakan-kebijakan yang akan ia lakukan, ketika nanti ia terpilih menjadi Presiden AS. Dari sekian banyak arah kebijakan yang disampaikan, salah satunya membahas mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk Keluar dari perjanjian TPP, baik dari keanggotaan maupun kesepakatan yang telah dinegosiasikan.

Hal ini juga ditegaskan oleh Trump melalui pernyataan di sosial media yang diunggah melalui akun Twitter pribadinya dengan nama pengguna @realDonaldTrump yang berbunyi: “The Trans-Pacific Partnership will increase our deficits & send even more jobs overseas. This is a bad deal. Time for smart trade!” "Kemitraan Trans-Pasifik akan meningkatkan defisit dan mengirim lebih banyak lagi pekerjaan ke luar negeri. Ini adalah transaksi yang buruk. Waktunya untuk perdagangan yang cerdas!". Trump juga membuka rencananya di situs miliknya. Rencana itu antara lain meningkatkan anggaran infrastruktur, lalu memangkas tarif pajak untuk bisnis dan individu, menata kembali perjanjian-perjanjian perdagangan, terutama dengan China dan Meksiko (Ardhani, 2019). Sejak kmapnye Trump sudah merencanakan pengurangan defisit perdagangan dengan menekan impor. Selain itu Trump cenderung menarik diri dari perjanjian regional seperti paris agreement bahkan cenderung memilih kerjasama perdagangan bilateral yang lebih menguntungkan Amerika (Cipto, Politik Global Amerika Dari Obama ke Trump, 2018)

Hasil pemilihan presiden AS pada tahun 2016 menyatakan bahwa Trump berhasil memenangkan pemilihan presiden AS dengan memperoleh 306 suara, sedangkan lawannya yakni Hillary Clinton memperoleh 232 dari total suara (The New York Times, 2017). Sejak itu Trump menyandang status sebagai presiden AS

terpilih, yang akan menggantikan Barack Obama pada masa kepemimpinan selanjutnya. Pada tanggal 21 November 2016, presiden terpilih Donald Trump sudah mulai menunjukkan langkah-langkah yang akan ia ambil ketika resmi menjabat sebagai presiden Amerika Serikat. Trump kemudian mengumumkan bahwa ia berencana untuk menarik Amerika Serikat serta menghentikan dukungan terhadap TPP dan akan membatalkan keputusan TPP Obama pada hari pertamanya menjabat di Oval Office. "Pada perdagangan, saya akan mengeluarkan pemberitahuan tentang niat untuk menarik diri dari TPP, sebuah potensi bencana bagi negara kita. Sebaliknya, kita akan menegosiasikan kesepakatan perdagangan bilateral yang adil yang membawa lapangan kerja dan industri kembali ke Amerika", Trump mengatakan dalam pesan video singkat. Setelah resmi dilantik, di hari pertama kerjanya pada tanggal 23 Januari 2017 Trump resmi menandatangani sebuah memorandum presiden mewakili Amerika Serikat untuk menarik diri dan menghentikan dukungan terhadap TPP, sesuai dengan rencana kampanye yang ia lakukan.

Dari penjelasan di atas sangat menarik bagi penulis untuk mengkaji latar belakang keputusan Donald Trump untuk Mengambil Keputusan untuk keluar dari TPP, mengingat lebih dari delapan tahun upaya negosiasi yang telah dilakukan oleh AS pada era Obama untuk memasukkan isu-isu dalam TPP Agreement, yang

tentunya mengutamakan kepentingan AS secara keseluruhan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian, yaitu **“Mengapa Amerika keluar dari perjanjian Trans-Pacific Partnership pada masa pemerintahan Donald Trump”**.

## **C. Kerangka Pemikiran/Teori**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pilihan rasional (Rational Choice) Teori pilihan rasional, atau biasa disebut juga sebagai **rational action theory** atau choice theory digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi bagaimana cara memahami perilaku individu dalam melakukan suatu pengambilan keputusan yang rasional (Amadae, 2007). Defenisi mengenai teori pilihan rasional menurut para ahli tentu beragam salah satunya Graham T. Allison. Graham T. Allison yang merupakan seorang teoritis yang mempelajari politik luar negeri dalam hubungan internasional di Harvard, Graham T. Alisson berpendapat bahwa untuk menganalisis suatu proses kebijakan luar negeri antara lain dapat digunakan rational policy model. Proses kebijakan itu sendiri secara teoritik sangat dipengaruhi oleh adanya faktor politik domestik dan eksternal internasional. (Allison, 1969)

Dalam perspektif “Decision Making Process”, Graham T Allison dalam bukunya *Essence of Decision: Explaining The Cuban Missile Crisis*, yang diterbitkan Boston: Little, Brown and Company tahun 1971, mengajukan tiga paradigma yang dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan luar negeri negara-negara di dunia, yaitu Model Aktor Rasional (MAR), Model Proses Organisasi (MPO), dan Model Politik Birokratik (MPB), yang akan diuraikan secara singkat berikut ini:

1. Model Aktor Rasional (Rational Actor)  
Model ini menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan akan melewati tahapan penentuan tujuan, alternatif/opsi, konsekuensi, dan pilihan keputusan. Model ini menyatakan bahwa keputusan yang dibuat merupakan suatu pilihan rasional yang telah didasarkan pada pertimbangan rasional/intelektual dan kalkulasi untung rugi sehingga diyakini menghasilkan keputusan yang matang, tepat, dan prudent.
2. Model Proses Organisasi (the Organizational Process) Model ini menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan merupakan suatu proses mekanistik yang melewati tahapan, prosedur, dan mekanisme organisasi dengan prosedur kerja baku (standard operating procedure) yang telah berlaku selama ini. Keputusan yang ditetapkan

dipandang sebagai output organisasi yang telah mempertimbangkan tujuan, sasaran, dan skala prioritas organisasi.

3. Model Politik Birokratik (Bureaucratic/Governmental Politics)  
Model ini menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan dirumuskan oleh berbagai aktor, kelompok, dan pihak yang berkepentingan melalui proses tarik menarik, tawar menawar, saling mempengaruhi dan kompromi antar stakeholders terkait. Keputusan yang ditetapkan merupakan proses resultan politik yang melewati deliberasi yang panjang dan kompleks

Pada permasalahan ini penulis lebih memilih model aktor rasional karena perubahan kebijakan ini lebih berorientasi pada individu sebagai pembuat keputusan. Keputusan yang di ambil oleh Donald Trump untuk keluar dari TPP dilakukan dengan tujuan yaitu menjaga kedaulatan dan mendapatkan keuntungan yang optimal. Model aktor rasional menyatakan bahwa, dalam politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional. Dalam model aktor rasional, negara digambarkan sebagai sebuah aktor individu rasional, memiliki pengetahuan yang sempurna terhadap situasi dan mencoba memaksimalkan nilai dan tujuan berdasarkan situasi yang ada. Berbagai tindakan negara-negara dianalisis dengan asumsi bahwa

negara-negara mempertimbangkan semua pilihan dan bertindak rasional untuk memaksimalkan keuntungan. Dalam proses pembuatan kebijakan, pemerintah dihadapkan dengan berbagai pilihan kebijakan dimana masing-masing pilihan kebijakan tersebut memiliki konsekuensi. Negara sebagai aktor rasional akan memilih alternatif kebijakan yang memiliki konsekuensi paling tinggi (menguntungkan) dalam memenuhi tujuan yang ingin dicapai (goals and objectives) (Allison, 1969)

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menjabarkan keuntungan dan kerugian mengenai perubahan kebijakan Amerika dalam keanggotaan AS pada perjanjian Trans-pasific partnership. Berikut tabel keuntungan dan kerugian keanggotaan AS di TPP yang dapat dilihat pada tabel 1 :

TPP berdasarkan latar belakang

<b>Opsi</b>	<b>Keuntungan Amerika</b>	<b>Kerugian Amerika</b>
<b>Tetap Berada di TPP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AS Dapat mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional yang menguntungkan bagi Kepentingan Politik Amerika Serikat) dan memperluas wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trump merasa bergabung dengan TPP dianggap merugikan sektor manufaktur. Banyak pekerja AS yang kehilangan pekerjaannya</li> </ul>

	<p>pengaruh. Secara politis TPP dapat dijadikan sebuah wadah bagi Amerika Serikat untuk menyampaikan kepentingan-kepentingannya dan mengamankan posisinya dalam tata hubungan ekonomi internasional khususnya pada perdagangan regional di Asia pasifik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TPP secara signifikan akan memperluas ekspor barang dan jasa yang berasal dari Amerika Serikat dan mendukung pekerja Amerika. TPP akan menghilangkan dan mengurangi pajak impor atau tarif pada ekspor dari Amerika ke negara-negara TPP</li> </ul>	<p>karena banyak pengusaha-pengusaha di AS lebih mencari tenaga kerja dengan upah terjangkau di negara lain. lain yang dimana memang upah tenaga kerja di Amerika Serikat yang lebih besar dibandingkan dengan negara yang masih berkembang. Oleh karena itu penerapan tarif pajak hingga 0% sebagai tujuan TPP. Akan membuat para pengusaha di AS mencari tempat produksi yang lebih murah selain AS.</p>
--	--	--

<p><b>Keluar dari TPP</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemudahan Trump untuk lebih leluasa Melakukan Intensi kerjasama bilateral dengan negara Anggota tanpa ada Peraturan yang mengikat dari TPP.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya Penurunan hambatan tarif dalam TPP akan mempermudah AS dalam Mengekspor produk dan jasa yang di miliki. Namun dengan keluarnya AS harga ekspor barang dan jasa AS di negara anggota TPP akan menjadi lebih tinggi dari pada tarif ekspor sebelumnya, hal ini membuat harga produk barang dan jasa AS di pasar negara-negara anggota TPP akan menjadi lebih mahal dari sebelumnya walaupun dengan jenis</li> </ul>
-------------------------------	---	---

		komuditas barang dan jasa yang sama dengan negar anggota TPP.
--	--	---

Berdasarkan keuntungan dan kerugian yang telah di jabarkan di atas, penulis melihat dalam sistem pemerintahan AS, Presiden sebagai pemegang otoritas sekaligus wewenang tertinggi selaku kepala pihak eksekutif dalam setiap aksi luar negerinya merupakan figur yang mengakumulasi keuntungan dan menekan kerugian dan pihak eksekutif juga sebagai pengelola hukum serta perwakilan negara dalam dunia internasional. Oleh karena itu keuntungan dan kerugian AS bergabung dengan TPP menurut penulis, Amerika masih mempunyai prospek keuntungan yang menjajikan dalam hubungan kerjasama regional AS di TPP namun Pertimbangan Trump sebagai president juga tidak dapat di pungkiri bahwa adanya bukti kerugian pada Industri manufaktur di As juga bisa menjadi alasan Amerika keluar dari TPP.

Dari pejelasan teori pilihan rasional di atas keputusan trump untuk Keluar dari TPP karena sejak awal terpilih, Trump mempunyai paham Nativisme yang menggambarkan kepemimpinannya yang memposisikan keberpihakan kepentingan bangsa AS. Adanya Slogan dia awal kampanyenya “Make America Great Again” menjadi acuan Amerika untuk keluar dari perjanjian TPP. Donald Trump

mengatakan bahwa dengan adanya dasar tujuan tersebut AS dapat mewujudkan negaranya menjadi negara yang sejahtera untuk kedepannya. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan oleh Donald Trump hal yang paling diutamakan adalah orientasi optimalisasi hasil dan keuntungan ekonomi untuk mensejahterakan AS

Menganalisa foreign policy sebagai bentuk proses rasionalitas atau disebut foreign policy making as rational process menurut Allison bahwa Rational decision making model terbentuk dari aktor kesatuan (unitary actor) yang menjalankan peran sebagai rasional aktor dalam pengambilan sebuah keputusan. Kebijakan luar negeri tersebut menjadi sebuah langkah dalam menangani konflik maupun permasalahan yang dihadapi negara. Seperti dikatakan dalam kaitannya mengenai Rational Decision-Making Model adalah bahwasanya sebagai “foreign policy as results from an intellectual process where the actors choose what is the best for the country and select”. Maka dalam rasionalitas pengambilan kebijakan sebagai tujuan menjalankan kebijakan yang terbaik bagi negara.

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan teori rasional choice yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka jawaban sementara mengapa Amerika merubah kebijakannya untuk keluar dari perjanjian trans-pacific partnership di

masa pemerintahan donald trump yaitu berdasarkan alasan :

“Adanya kepemimpinan Trump yang lebih mengedepankan perdagangan bilateral dengan negara anggota TPP untuk menciptakan perdagangan yang lebih leluasa dan menguntungkan secara bilateral dengan masing-masing negara.”

### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Menganalisa Alasan Kebijakan Trump pada TPP dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Keluarnya Amerika
- b. Mengetahui bentuk pengambilan keputusan trump secara rasional terhadap Perekonomian Amerika di TPP

### **F. Jangkauan Penelitian**

Penulisan proposal skripsi ini mempunyai jangkauan penelitian pada tahun 2008-2017. Hal ini didasari akan terhitungnya awal Amerika bergabung dengan Trans-pasific Partnership (TPP) hingga keluarnya AS dari Trans-pasific Partnership.

## **G. Metode Penelitian**

1. Metode Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan kepada teknik library research atau penelitian kepustakaan. Data-data yang diperoleh adalah data valid dan merupakan data sekunder yang didapatkan dari media cetak berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen. Selain itu, data juga didapatkan dari media internet seperti situs resmi ataupun situs berita, serta sumber-sumber lainnya yang terkait dengan dengan objek penelitian serta dapat menunjang proses penelitian.
2. Metode Analisis Data Penelitian ini menggunakan teknik analisa induktif atau dengan memahami fakta. Yaitu diawali dengan mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan objek analisa. Kemudian fakta-fakta tersebut dirubah menjadi generalisasi empiris. Dari generalisasi empiris inilah dilakukan proses perumusan konsep, perumusan dan perangkaian preposisi, dan kemudian diubah menjadi induksi teori. (Mas'oe'd, 1990)

## **H. Sistematika Penulisan**

Pada bab 1 Pendahuluan Merupakan bab yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran,

hipotesis, serta metodologi penelitian yang berisi penjelasan mengenai tipe penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan. Kemudian pada bab II Membahas Dinamika Bergabungnya Amerika Pada Perjanjian Trans- Pasific Partnership. Merupakan penjelasan tentang awal mula Amerika tertarik berkerjasama di Kawasan regional Asia Pasifik hingga terlibat dalam perjanjian kerjasama dalam memajukan globalisasi di Asia pasifik melalui Trans-Pasific Partnership Agreement (TPP). Dan juga menjelaskan Tentang visi misi TPP itu sendiri. Kemudian bab III Pertimbangan Rational Trump Dalam Pengambilan keputusan Keluar dari TPP Menjelaskan tentang alasan trump mengambil pilihan untuk mundur dari TPP berdasarkan pilihan rasional Trump dan juga menjelaskan keuntungan serta kerugian dalam pengambilan keputusan AS untuk keluar dari Trans-Pasific Partnership Dan yang terakhir bab IV Kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan dari paparan Hipotesa dengan mengaitkan hasil penelitian yang sudah diteliti oleh penulis pada bab sebelumnya.